

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **6.1 Kesimpulan**

Penelitian Manajemen *Program Peningkatan Kesempatan Kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang* yang telah peneliti lakukan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen Program Peningkatan Kesempatan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang dan menganalisisnya sehingga dapat diketahui apakah proses manajemen program ini berjalan secara efektif atau tidak. Program Peningkatan Kesempatan kerja ini bertujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Kota Padang dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta memberi bekal pengetahuan dan keterampilan/keahlian untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari agar dapat membuka usaha sendiri.

Dari penelitian yang telah peneliti lakukan secara keseluruhan Manajemen Program Peningkatan Kesempatan Kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang sudah dijalankan sesuai dengan teori, namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan program ini fungsi-fungsi manajemen yang ada menurut sudut pandang George R. Terry dimulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, Penggerakkan dan pengawasan. Walaupun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa masalah dan kekurangan pada proses manajemen yang dilakukan yaitu pada proses Perencanaan, Pengorganisasian, dan Pengawasannya.

1. Perencanaan (*Planning*)

Pada Manajemen Program peningkatan Kesempatan Kerja telah dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang secara baik, seperti pada menentukan dan menetapkan tujuan, sumber-sumber yang diperlukan, serta menentukan organisasi, metode, dan prosedur. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala seperti segi biaya masih kurang, biaya yang digunakan berasal dari dana APBD Kota Padang. Walaupun sudah dianggarkan namun masih dirasa kurang dalam pelaksanaannya.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Manajemen Program peningkatan Kesempatan Kerja di Dinas tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang telah dilakukan sesuai dengan teori yaitu terdapat indikator pembagian kerja, pengelompokan pekerjaan dan koordinasi. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala yaitu bukan dari *internal* dinasnya tetapi dari *eksternalnya*. Ketika melakukan pembagian kelompok dalam kegiatan pada program Peningkatan Kesempatan Kerja, Peserta yang ikut susah untuk dihubungi karena nomor *telephone* yang diberikan tidak aktif. Terakhir adanya koordinasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang dengan Lembaga Pelatihan Keterampilan (LPK) dalam melaksanakan program tersebut.

3. Penggerakkan (*Actuating*)

Manajemen Program peningkatan Kesempatan Kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang telah dilakukan dengan indikator

pemberian motivasi, kepemimpinan, dan komunikasi. komunikasi yang terjalin sangat lancar, kepemimpinannya demokratis dan mengayomi serta adanya memberikan motivasi kepada peserta yang ikut pelatihan pada Program peningkatan Kesempatan Kerja.

#### 4. Pengawasan (*Controlling*),

Pada Manajemen Program peningkatan Kesempatan Kerja pengawasan telah dilakukan dengan menetapkan standar, mengukur kinerja, dan memperbaiki penyimpangan. Namun terdapat kendala dalam pelaksanaannya yaitu Seharusnya dengan pengawasan yang baik program ini dapat berjalan sesuai yang direncanakan namun pada kenyataannya tidak. Setelah program selesai dilaksanakan dinas tidak tahu berapa pesertanya yang sudah bekerja/belum. Seharusnya dengan pengawasan yang baik dinas bisa mengawasi walaupun program sudah selesai dilaksanakan, sehingga bisa didata berapa yang sudah bekerja/belum bekerja.

### 6.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu, berikut ini dikemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dari segi dana diharapkan bisa lebih besar lagi sehingga peserta punya modal untuk membuka usaha sendiri.
2. Diharapkan dalam segi pembagian kelompok yang ada pada kegiatan-kegiatan Program Peningkatan Kesempatan Kerja lebih diupayakan agar peserta menaati peraturan yang ada dengan memberikan nomor telephone yang mudah untuk dihubungi.

3. Diperlukan adanya pengawasan yang lebih dalam pemantauan setelah program selesai dilaksanakan, karena Dinas Tenaga Kerja tidak bisa mendata berapa pesertanya yang sudah dapat pekerjaan setelah pelatihan pada kegiatan-kegiatan Program Peningkatan Kesempatan Kerja selesai.

